

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan negara, dimana pembangunan mengarah pada proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Proses pembangunan tersebut meliputi perubahan diberbagai aspek, baik itu aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi suatu negara.

Komponen dasar atau nilai keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*) dan kebebasan (*freedom*), yang merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap masyarakat (Todaro, 2000). Kecukupan dalam hal ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, kesehatan dan keamanan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menjalankan kehidupannya. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara berkembang, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara.

Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Salah satu indikator terpenting yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia atau dikenal dengan pembangunan manusia.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (United Nation Development Programme, UNDP).

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu negara atau daerah yang dilihat berdasarkan tiga indikator, yaitu : indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan yang terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. (*United Nation Development Programme, UNDP, 1990*).

Keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau yang sering disebut dengan modal manusia di suatu daerah juga tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang ada, karena kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor

penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (teori Cobb-Douglas). Dalam teori Cobb-Douglas mengemukakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas human capitalnya. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Oleh sebab itu, dalam rangka rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya.

Mengenai kebijakan dalam perekonomian, pemerintah memiliki berbagai peran. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, menurut Guritno (2001), yaitu : (1) Peran Stabilisasi, pemerintah lebih berperan sebagai stabilitator untuk menjaga perekonomian berjalan normal. (2) Peran Distribusi, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi dengan baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan oleh warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ketiga peran yang ada, maka tentunya diperlukan pula dana yang besar sebagai bentuk pengeluaran segala kegiatan yang berkaitan dengan ketiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ketiga peran tersebut.

Sumber dana pengeluaran pemerintah dalam daerah telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 tentang otonomi daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal untuk mengembangkan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah dengan APBD merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam memajukan daerahnya. Maryani (2010) menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait pembangunan manusia. Lebih spesifiknya pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM.

Selain dari sisi anggaran, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi IPM yakni apabila jumlah penduduk miskin disuatu daerah tinggi maka akan menurunkan IPM.

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang

bermula dari ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target pencapaian IPM yang ditentukan pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik (Mirza, 2012). Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktifitas yang rendah. Hal ini pada akhirnya akan berimbas pada terbatasnya upah atau pendapatan yang mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan berdampak pada tingkat pembangunan manusia.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak daerah yang memiliki perbedaan alokasi anggaran, potensi, serta keunggulan. Perbedaan dalam pengalokasian anggaran terlihat dalam jumlah anggaran yang diberikan pemerintah untuk tiap daerah tersebut. Ada beberapa sumber dana yang diberikan oleh pemerintah untuk kemajuan tiap daerah. Dana tersebut antara lain dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga beberapa pinjaman dari luar negeri serta sumber dana pemerintah yang lain.

Indonesia termasuk negara yang memiliki kemajuan dalam hal pembangunan manusianya. Di regional ASEAN Indonesia masuk dalam kelompok medium setara dengan Filipina, Vietnam, Timor Leste, Kamboja dan Laos. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Negara-Negara ASEAN, Tahun 2013

No	Negara	Skor IPM	Peringkat	Perubahan Peringkat IPM 2008-2013	Rata-rata Pertumbuhan (%) 2000-2013	Kelompok
1	Singapura	0,901	9	14	0,92	Very High
2	Brunai Darussalam	0,852	30	2	0,27	Very High
3	Malaysia	0,773	62	1	0,58	High
4	Thailand	0,722	89	3	0,83	High
5	Indonesia	0,684	108	4	0,90	Medium
6	Filiphina	0,660	118	-1	0,49	Medium
7	Vietman	0,638	121	2	2	Medium
8	Timor Leste	0,620	128	5	2,25	Medium
9	Kamboja	0,584	136	-1	1,75	Medium
10	Laos	0,569	139	3	1,44	Medium
11	Myanmar	0,524	150	0	1,64	Low

Sumber : UNDP, 2014

Dilihat dari tabel diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2013 sebesar 0,648. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,44 persen bila dibandingkan dengan skor IPM pada tahun 2012 yang sebesar 0,681. Meski mengalami kenaikan, peringkat IPM Indonesia tetap berada di urutan 108 dari 187 negara. Keadaan ini tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2014. Progres Indonesia dalam soal pembangunan manusia boleh dibilang sedikit lambat. Sepanjang periode 2000-2013 pertumbuhan skor IPM Indonesia rata-rata sebesar 0,9 per tahun. Progres yang lambat juga tercermin dari perubahan peringkat IPM Indonesia sepanjang periode 2008-2013 yang hanya naik empat peringkat. Namun pencapaian IPM Indonesia masih tetap unggul di bandingkan

dengan Filipina (118), Vietnam (121). Timor Leste (128), Kamboja (136), Laos (139), dan terakhir Myanmar (150)

Disamping itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan secara terus menerus. Hal tersebut dilihat dari gambar berikut :



Gambar 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 menggunakan perhitungan metode dengan metode baru. Pada tahun 2010 nilai indeks pembangunan manusia Indonesia sebesar 66,53. Kemudian pada tahun 2011 naik menjadi 67,09. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2012 tidak terlalu besar yaitu hanya sebesar 67,70 tidak jauh dari tahun

sebelumnya. Sampai pada tahun 2014 peningkatan indeks pembangunan manusia mencapai 68,90 dengan rata-rata peningkatan 0.87% setiap tahunnya.

Di balik peningkatan IPM yang terjadi di Indonesia, ada sumbangan dari provinsi-provinsi yang menjadi pendukung, di antaranya : (1) Provinsi dengan IPM tinggi meliputi : DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Riau. (2) Provinsi dengan IPM sedang meliputi : Sulawesi Utara, Banten, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, Lampung, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, NTB, NTT, Sulawesi Barat, Papua Barat. Dan yang terakhir dengan IPM terendah adalah Provinsi Papua.

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, beberapa faktor yang mempengaruhinya perlu mendapatkan perhatian. Perlu diketahui besarnya peranan yang diberikan oleh pemerintah terhadap faktor tersebut. Peran serta pemerintah yang telah berjalan saat ini yaitu : kebijakan pemberian anggaran dana untuk pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pendekatan PDRB riil per kapita. Dengan peran seras pemerintah, maka diharapkan pembangunan manusia di Indonesia dapat berjalan dan berkualitas, sehingga sumber daya manusia dapat semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang dilaha, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan dapat mempengaruhi Indeks

Pembangunan Manusia di 33 Provinsi di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini berjudul *“Pengaruh PDRB, Belanja Daerah dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap IPM Tahun 2010-2014 (Studi Pada 33 Provinsi Di Indonesia)”*.

B. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak menyimpang dari dari sasaran yang dituju. Penelitian ini hanya membahas besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian yang dilakukan adalah

- a. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan perumusan dan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan terkait dengan masalah indeks pembangunan manusia.
- b. Bagi akademis, diharapkan diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi publik, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai indeks pembangunan manusia di Indonesia.